

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN  
LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA  
DI INDONESIA TAHUN 2012**

Maryadi

Fakultas Ekonomi - Jurusan Akuntansi

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang, Mei 2014

**ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia baik secara parsial maupun secara simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2012.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.

**Kata Kunci** : *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah.*

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota pada tahun 2012. Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 32 tahun 2004).

Pelaksanaan otonomi daerah ini diberlakukan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu pada tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten dan/atau kota. Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan proses pemerintahan di daerah wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan.

Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 ayat Undang-Undang No.33 Tahun 2004 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA); penerimaan Pinjaman Daerah; Dana Cadangan Daerah; dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan Publik (Putro, 2010).

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.2 (2011), Belanja Modal (*Capital Expenditure*) adalah pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Syaiful (2006) Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

Berdasarkan data Direktorat EPIKD, Ditjen Perimbangan Keuangan dalam hal ini Subdit Data Keuangan Daerah tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2012 yang secara kumulatif, pendapatannya ditargetkan mencapai Rp 162,76 triliun sedangkan belanja sebesar Rp 174,02 triliun. Dengan demikian terjadi defisit anggaran secara kumulatif sebesar Rp 11,26 triliun.

Dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 321,67 triliun dan belanja yang lebih besar yaitu mencapai Rp 345,17 triliun maka total defisit di Kabupaten mencapai Rp 23,5 triliun. Demikian pula di Kota, dengan total pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 81,96 triliun dan alokasi belanja sebesar Rp 86,58 triliun maka akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 4,62 triliun.

Defisit pada Kabupaten sebesar Rp 23,5 triliun tersebut dibiayai dengan SiLPA tahun lalu dan komponen-komponen pembiayaan lainnya sebesar Rp 23,87 triliun sehingga akan terjadi SiLPA Tahun Anggaran berjalan sebesar Rp 369,4 miliar. Sementara itu, pembiayaan untuk defisit anggaran di Kota sebesar Rp 4,69 triliun sehingga akan terjadi SiLPA Tahun Anggaran berjalan sebesar Rp 72,7 miliar pada Kota.

Meskipun secara kumulatif direncanakan terjadi defisit anggaran baik di Kabupaten maupun Kota, namun terdapat juga daerah yang merencanakan anggaran surplus dan berimbang. Dari sebanyak 477 Kabupaten/Kota terdapat 63 Kabupaten/Kota yang merencanakan anggaran surplus dan sebanyak 9 Kabupaten/Kota yang merencanakan anggaran berimbang sedangkan 405 Kabupaten/Kota merencanakan anggaran defisit.

Sulit untuk menentukan berapa besar sebenarnya alokasi belanja publik yang ideal di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengingat kompleksitas masalah pembangunan daerah, karakteristik daerah, serta celah fiskal antara kemampuan dana dan kebutuhan pembangunan di daerah yang berbeda-beda (Kumorotomo 2010). Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat (Kurniawan, 2010).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Kusnandar dan Dodik Siswanto, 2012 dengan judul *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal* adalah penambahan variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu dari Dana Perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dalam format SAP Tahun 2012.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian ini: **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA TAHUN 2012"**.

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 dan Apakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 dan secara bersama-sama apakah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012?.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Belanja Modal**

Menurut Syaiful (2006) Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Lampiran I.01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila : (a) pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset

lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas; (b) pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; (c) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan atau dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan atau pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

## **Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005) Pendapatan Asli Daerah merupakan Suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan mampu untuk membantu keuangan daerah dalam proses otonomi yang dilakukan. Pendapatan Asli Daerah tentu berbeda-beda disetiap daerah, mengingat kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan itu tergantung dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimilikinya dan juga potensi dari daerah itu untuk mengelolanya.

PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Daerah dilarang: menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pendapatan Asli Daerah memiliki instrumen-instrumen yang penting, salah satunya ialah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberlakuan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya (Marihot P. Siahaan, 2005).

## **Dana Alokasi Umum**

Menurut Kuncoro (2004) Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk

tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah yang kaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Simanullang (2013) penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.

Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.

Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

### **Dana Bagi Hasil**

Menurut Kuncoro (2004) Dana Bagi Hasil merupakan pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam dan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: kehutanan; pertambangan umum; perikanan; pertambangan minyak bumi; pertambangan gas bumi; dan pertambangan panas bumi.

### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Lampiran I.01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008 dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

### **Luas Wilayah**

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas Wilayah Pemerintahan merupakan jumlah ukuran dari besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, kota, maupun provinsi. Luas wilayah sangat erat kaitannya dengan geografis suatu daerah.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari belasan ribu pulau yang tersebar. Untuk memperlancar proses pemerintahan di daerah yang luas, maka salah satu tujuan pembangunan adalah membangun infrastruktur. Infrastruktur merupakan instrument untuk memperlancar berputarnya roda pemerintahan serta perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan (Basri, 2002).

Pembangunan yang berjalan cepat akan menuntut tersedianya infrastruktur agar pembangunan tidak tersendat. Infrastruktur di wilayah yang luas berguna untuk memudahkan mobilitas faktor produksi, terutama penduduk, memperlancar mobilitas barang dan jasa dan tentunya memperlancar transaksi ekonomi antar daerah.

### **Hipotesis**



Berdasarkan asumsi di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.
- H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.
- H3: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.
- H4: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.
- H5: Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.
- H6: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Data dan Variabel**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Indonesia yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal. Data Luas Wilayah bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang diunduh melalui situs web resmi Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id).

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen (variabel bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah menjadi variabel independen.
2. Variabel dependen (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini Belanja Modal menjadi variabel dependen.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang berjumlah 497 Kabupaten dan Kota pada Tahun 2012.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten dan Kota di Indonesia yang telah memasukkan data Laporan Realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012.
2. Kabupaten dan Kota yang membuat Laporan Realisasi APBD dalam format SAP.
3. Kabupaten dan Kota yang melaporkan anggaran dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal yang digunakan sebagai bahan penelitian ini.
4. Jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah dan Belanja Modal tidak (-) minus dan tidak (0) nol.

Kabupaten/Kota yang telah memenuhi kriteria untuk dipergunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Jumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 : 497
- Jumlah Kabupaten dan Kota yang tidak memenuhi kriteria : 98

Jumlah Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria :  $497 - 98 = 399$

## **Metode Analisis Data**

### **Statistik Deskriptif**

Analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan sampel Kabupaten/Kota di Indonesia. Data dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Indonesia yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya.

### **Pengujian Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Uji ini untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

### **Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan *lawannya variance inflation factor (VIF)*. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* > 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* < 10.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Prasyarat dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji statistik glejser.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan teknik estimasi yang digunakan untuk mencari persamaan regresi menggunakan metode kuadrat terkecil untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah dalam hubungannya dengan Alokasi Belanja Modal.

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat diformulakan sebagai berikut:

$$BM = \quad + \quad {}_1\text{PADt} + \quad {}_2\text{DAUt} + \quad {}_3\text{DBHt} + \quad {}_4\text{SiLPAt} + \quad {}_5\text{LUAS} + e$$

Dimana:

= konstanta

i = koefisien regresi

BM = Belanja Modal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
LUAS = Luas Wilayah  
t= periode  
e = error

### **Pengujian Hipotesis**

#### **Koefisien Determinasi**

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.

#### **Uji t**

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Jika probabilitas atau signifikansi  $> 0,05$  maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, jika  $< 0,05$  maka variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **Uji F (Fisher)**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independennya yang dimaksudkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Kriteria pengujian uji F adalah, apabila nilai signifikan F lebih rendah dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang diteliti secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen.

## **HASIL DAN ANALISIS**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian dan Data Penelitian**

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang menyampaikan Laporan Realisasi APBD pada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*, maka Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel sekaligus data penelitian berjumlah 399.

### **Statistik Deskriptif**

Adapun gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi untuk data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari statistik deskriptif berikut ini:

#### **Tabel 4.1**

#### **Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	399	47051	1817070	203502.01	177195.095
PAD	399	2985	2279610	91258.53	190372.291
DAU	399	691	1672610	502910.90	232444.833
DBH	399	8877	5097972	148718.77	373018.068
SiLPA	399	219	2441490	112433.45	208544.091
LUAS	399	16.06	44071.00	3873.2206	5428.75426
Valid (listwise)	N 399				

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 20.0

Keterangan : dalam jutaan Rupiah, kecuali Luas dalam Km<sup>2</sup>

### Pengujian Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah model regresi dalam variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak.

Tabel 4.2

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	BM	PAD	DAU	DBH	SiLPA	LUAS
N	399	399	399	399	399	399
Normal Parameters <sup>a</sup> , Mean	203502.01	91258.53	502910.90	148718.77	112433.45	3873.2206
Std. Deviation <sup>b</sup>	177195.095	190372.291	232444.833	373018.068	208544.091	5428.75426
Most Extreme Differences Absolute	.204	.321	.118	.356	.295	.239
Positive	.204	.270	.118	.333	.282	.213
Negative	-.197	-.321	-.099	-.356	-.295	-.239
Kolmogorov-Smirnov Z	4.0751	6.421	2.367	7.110	5.898	4.768
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 20.0

Melihat hasil dari tabel diatas, hasil menunjukkan nilai signifikansi tidak berdistribusi normal. Sehingga variabel independen dalam penelitian ini di transformasikan dengan menggunakan logaritma natural.

**Tabel 4.3**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		LnBM	LnPAD	LnDAU	LnDBH	LnSiLP A	LnLUAS
N		399	399	399	399	399	399
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	12.01 86	10.68 67	13.01 91	11.08 02	10.949 7	7.4164
	Std. Deviation	.5859 8	1.129 68	.5489 6	1.057 31	1.1959 2	1.5320 9
	Absolute Most Extreme Differences	.056	.036	.116	.118	.077	.096
	Positive	.056	.036	.062	.118	.066	.048
	Negative	-.038	-.025	-.116	-.083	-.077	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		1.110	.725	2.321	2.361	1.542	1.917
Asymp. Sig. (2- tailed)		.170	.670	.000	.000	.017	.001

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 20.0

Setelah melakukan transformasi, tampak bahwa baru dua variabel yang terdistribusi secara normal, untuk mendapatkan normalitas data langkah screening berikutnya yang harus dilakukan adalah mendeteksi adanya data outlier. *Outlier* adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2006). Data outlier akibat perubahan data sebanyak 180, sehingga data yang tersisa dan dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 219.

**Tabel 4.4**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		lnBM	lnPAD	LnDAU	lnDBH	lnSiL PA	lnLUA S
N		219	219	219	219	219	219
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	11.89 06	10.31 36	13.063 2	10.60 09	10.81 90	7.875 5
	Std. Deviation	.3872 7	.9415 2	.34306	.4780 2	.7738 9	.9049 9

	Absolute	.034	.053	.056	.052	.079	.060
Most Extreme	Positive	.034	.043	.056	.048	.042	.060
Differences	Negative	-.027	-.053	-.036	-.052	-.079	-.031
Kolmogorov-Smirnov Z		.503	.788	.834	.767	1.173	.893
Asymp. Sig. (2-tailed)		.962	.563	.491	.598	.127	.403

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 20.0

**Tabel 4.5**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		219
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.29064371
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.042
	Negative	-.042
Kolmogorov-Smirnov Z		.616
Asymp. Sig. (2-tailed)		.843

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 20.0

Berdasarkan tabel di atas, dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah > 0,05. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*.

**Tabel 4.6**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics

	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.598	.952		2.728	.007		
1 lnPAD	-.114	.037	-.277	3.072	.002	.326	3.068
lnDAU	.434	.098	.385	4.429	.000	.350	2.854
lnDBH	.234	.054	.289	4.323	.000	.590	1.694
lnSiLPA	.173	.028	.346	6.132	.000	.831	1.203
lnLUAS	.055	.026	.129	2.159	.032	.736	1.358

a. Dependent Variable: lnBM

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 20.0

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan menunjukkan nilai tolerance variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Prasyarat dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji statistik glejser.

**Tabel 4.7**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.170	.576		.295	.768
1 lnPAD	-.009	.022	-.047	-.390	.697
lnDAU	.045	.059	.088	.762	.447
lnDBH	-.041	.033	-.110	-1.234	.218
lnSiLPA	.001	.017	.003	.039	.969
lnLUAS	-.002	.016	-.012	-.152	.879

a. Dependent Variable: Absut

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 20.0



Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat penelitian ini menggunakan uji statistik glejser. Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel lnPAD adalah  $0,697 > 0,05$ , nilai signifikansi variabel lnDAU adalah  $0,447 > 0,05$ , nilai signifikansi variabel lnDBH adalah  $0,218 > 0,05$ , nilai signifikansi variabel lnSiLPA adalah  $0,969 > 0,05$ , dan nilai signifikansi variabel lnLUAS adalah  $0,879 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas karena nilai signifikansi dari semua variabel independen  $> 0,05$ .

### Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.8

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.598	.952		2.728	.007
1 lnPAD	-.114	.037	-.277	-3.072	.002
lnDAU	.434	.098	.385	4.429	.000
lnDBH	.234	.054	.289	4.323	.000
lnSiLPA	.173	.028	.346	6.132	.000
lnLUAS	.055	.026	.129	2.159	.032

a. Dependent Variable: lnBM

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 20.0

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\ln BM = 2,598 - 0,144 \ln PAD + 0,434 \ln DAU + 0,234 \ln DBH + 0,173 \ln SiLPA + 0,055 \ln LUAS + e$$

Penjelasan dari persamaan regresi berganda di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Nilai konstanta sebesar 2,598 artinya apabila variabel lnPAD, lnDAU, lnDBH, lnSiLPA dan lnLUAS bernilai 0, maka anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 meningkat sebesar Rp 2,598 juta.

b. Nilai koefisien regresi variabel lnPAD adalah -0,114. Nilai lnPAD yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah, yang artinya jika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka akan menurunkan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di

Indonesia Tahun 2012 sebesar Rp 144 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

c. Nilai koefisien regresi variabel lnDAU adalah 0,434. Nilai lnDAU yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan Dana Alokasi Umum, yang artinya jika Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 sebesar Rp 434 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

d. Nilai koefisien regresi variabel lnDBH adalah 0,234. Nilai lnDBH yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan Dana Bagi Hasil, yang artinya jika Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 sebesar Rp 234 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

e. Nilai koefisien regresi variabel lnSiLPA adalah 0,173. Nilai lnSiLPA yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang artinya jika Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 sebesar Rp 173 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

f. Nilai koefisien regresi variabel lnLUAS adalah 0,055. Nilai lnLUAS yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan Luas Wilayah, yang artinya jika Luas Wilayah mengalami peningkatan sebesar 1 Km<sup>2</sup> maka terjadi peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 sebesar Rp 55 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap.

### Pengujian Hipotesis

#### Koefisien Determinasi

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Adapun hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.9**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.661 <sup>a</sup>	.437	.424	.29404

a. Predictors: (Constant), lnLUAS, lnSiLPA, lnDBH, lnDAU, lnPAD

b. Dependent Variable: lnBM

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 20.0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka R disebut koefisien korelasi antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah dengan Belanja Modal adalah 0,661, ini artinya hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah dengan Belanja Modal adalah sangat kuat (signifikan) sebesar 66,10%. *Adjuster R<sup>2</sup>* dalam penelitian ini sebesar 0,424 atau 42,4%. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 adalah sebesar 42,4% atau hanya sebesar 42,4% variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 57,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**Uji t**

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Jika probabilitas atau signifikansi > 0,05 maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, jika < 0,05 maka variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**Tabel 4.10**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2.598	.952		2.728	.007
1 lnPAD	-.114	.037	-.277	-3.072	.002
lnDAU	.434	.098	.385	4.429	.000
lnDBH	.234	.054	.289	4.323	.000
lnSiLPA	.173	.028	.346	6.132	.000
lnLUAS	.055	.026	.129	2.159	.032

a. Dependent Variable: lnBM

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 20.0

**Uji F (Fisher)**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model regresi secara

bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Kriteria pengujian uji F adalah, apabila nilai signifikan F lebih rendah dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang diteliti secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen.

**Tabel 4.11**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	14.280	5	2.856	33.035	.000 <sup>b</sup>
Residual	18.415	213	.086		
Total	32.696	218			

a. Dependent Variable: lnBM

b. Predictors: (Constant), lnLUAS, lnSiLPA, lnDBH, lnDAU, lnPAD

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 20.0

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka dari hasil pengujian ini HA diterima dan H0 ditolak yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012**

Pengujian hipotesis pertama, variabel independen Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$  maka dari hasil pengujian HA diterima dan H0 ditolak yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 namun dengan arah negatif. Ini berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 semakin rendah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang menyatakan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Namun penelitian ini mendukung hasil pengujian Oktora dan Pontoh (2011) menunjukkan kurangnya hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.

Penggunaan Pendapatan Asli Daerah lebih banyak untuk membiayai belanja yang lain, seperti Belanja Rutin dan Belanja Operasional (Yovita, 2011), hal ini sejalan dengan Marihot P. Siahaan (2005) dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu

pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin terlebih dahulu selanjutnya untuk pembangunan.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012**

Pengujian hipotesis kedua, variabel independen Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dari hasil pengujian HA diterima dan  $H_0$  ditolak yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. Ini berarti semakin besar Dana Alokasi Umum maka semakin besar pula Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 .

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang mengatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil pengujian Oktora dan Pontoh (2011) bahwa hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal adalah sangat erat.

Proporsi Dana Alokasi Umum antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena adanya transfer Dana Alokasi Umum dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal (Putro, 2011).

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012**

Pengujian hipotesis ketiga, variabel independen Dana Bagi Hasil memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dari hasil pengujian HA diterima dan  $H_0$  ditolak yang menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. Ini berarti semakin besar Dana Bagi Hasil maka semakin besar pula Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wandira (2012) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Pemerintah daerah akan menetapkan Belanja Modal yang besar jika anggaran Dana Bagi Hasil besar, sebaliknya jika kecil Belanja Modal yang akan ditetapkan jika anggaran Dana Bagi Hasil kecil. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatana

Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Wandira, 2012).

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012**

Pengujian hipotesis keempat, variabel independen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dari hasil pengujian  $H_A$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. Ini berarti semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka semakin besar pula Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kusnandar dan Siswanto (2012) bahwa secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Menurut Kusnandar dan Siswanto (2012) SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Menurut Kumorotomo (2010), besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan kemampuan aparat daerah dalam penganggaran.

### **Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012**

Pengujian hipotesis kelima, variabel independen Luas Wilayah memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,032 < 0,05$  maka dari hasil pengujian  $H_A$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang menunjukkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. Ini berarti semakin besar Luas Wilayah maka semakin besar Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kusnandar dan Siswanto (2012) bahwa secara parsial Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Memiliki infrastruktur yang baik merupakan salah satu tujuan dari pembangunan daerah, dengan infrastruktur yang maksimal pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan baik dan lancar. Menurut Kusnandar dan Siswanto (2012) daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah**

## **terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012**

Pengujian hipotesis keenam, variabel independen memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka dari hasil pengujian ini  $H_A$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. Hal ini berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah secara bersama-sama (simultan) maka semakin besar pula peningkatan jumlah Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Kusnandar dan Siswanto (2011) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. Selain itu, penelitian Nuarisa (2012) menyatakan bahwa secara simultan seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Penelitian Wandira (2012) menyatakan secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012 namun dengan arah negatif.
2. Dana Alokasi Umum secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.
3. Dana Bagi Hasil secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.
5. Luas Wilayah secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.
6. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan data satu tahun sehingga tidak dapat mengetahui kecendrungan antar waktu.
2. Data penelitian ini hanya menitikberatkan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam format SAP saja.
3. Temuan dalam penelitian ini belum dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang alokasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, dan jenis Belanja Modal manakah yang lebih banyak mengkonsumsi anggaran tersebut.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data lebih dari satu tahun sehingga dapat mengetahui kecendrungan antar waktu.
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran yang lebih lengkap.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang alokasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, dan jenis Belanja Modal manakah yang lebih banyak mengkonsumsi anggaran tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit - Undip.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2012. *Buku Induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia*. Jakarta. Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Profil APBD TA 2012*. Jakarta. Subdit Data Keuangan Daerah, Dit. EPIKD, DJPK.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Keuangan Transfer Ke Daerah TA 2012*. DJPK.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2010. *Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja dan Silpa dalam Alokasi APBD*



di Beberapa Daerah. Universitas Gadjah Mada. *Makalah pada Konferensi Administrasi Negara ke-3, Bandung.*

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah.* Jakarta: Erlangga.

Kurniawan, Septian. 2010. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo. *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*

Kusnandar dan Dodik Siswantoro, 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Universitas Indonesia.*

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Nuarisa, Sheila Ardhian. 2012. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1 (3) (2013).

Oktora, Fahri Eka dan Winston Pontoh, 2011. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal di Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountability* Vol. 2, No. 1, Juni 2013.

Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS.* Yogyakarta: MediaKom.

Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi Universitas Diponegoro.*

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Simanullang, Gideon. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang. *UMRAH Journal Of Accounting* Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-24.

Syaiful. 2006. Pengertian dan perlakuan akuntansi belanja barang dan belanja modal dalam kaidah akuntansi pemerintahan. *Makalah*.

Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Universitas Pattimura Ambon. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 1, No, 2. Juli 2008.

Wandira, Arbie Gugus. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1 (3) (2013).

Wijaya, Tony. 2012. *Cepat menguasai spss 20 Untuk Olah Data dan Interpretasi Data*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

[www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)

Yovita, Farah Marta. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 - 2010)". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Semarang: UNDIP.